

PENGUATAN PERAN POLITIK PEREMPUAN DI NEGARA DUNIA KETIGASTUDI KASUS: DI BANGLADESH

Herti Agusma Thaharah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Bisnis dan Humaniora
Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: herti.agusma@gmail.com

Lucitania Rizky, S.IP., M.A.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Bisnis dan Humaniora
Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: lucitania.rizky@staff.uty.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penguatan peran politik perempuan di Bangladesh. Menggunakan kerangka pemikiran teori feminisme liberal, yang menekankan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik studi kepustakaan dan sumber daring (internet) untuk menganalisa proses penguatan perempuan dalam bidang politik. Penelitian ini menemukan bahwa, proses keberhasilan Bangladesh dalam melakukan penguatan politik perempuan, dilatarbelakangi oleh kehadiran dua aktor penting, yakni Liga Awami dan Organisasi Mahila Parishad, yang berhasil meningkatkan peran perempuan di ranah politik parlementer yang hanya 15 kursi di tahun 1973 menjadi 50 kursi di tahun 2008. Adapun kebijakan tersebut telah merepresentasikan adanya perluasan peran perempuan dan kesetaraan gender menurut teori feminisme liberal yang dikemukakan oleh Tickner dan Betty. Kedua aktor berpengaruh tersebut, berhasil menjadikan Bangladesh memposisikan diri sebagai satu-satunya Negara Dunia Ketiga dari wilayah Asia Selatan yang masuk dalam 100 besar isu gender gap global dari 165 negara. Menjadikan Bangladesh sebagai negara percontohan bagi Negara Dunia Ketiga lainnya dalam menyelesaikan masalah isu gender gap, khususnya dalam partisipasi perempuan di bidang politik.

Kata Kunci: Bangladesh, Feminisme liberal, Gender, Negara Dunia Ketiga, Politik perempuan.

ABSTRACT

This study discusses the strengthening of women's political roles in Bangladesh. Using the theoretical framework of liberal feminism, which is the existence of equal rights between men and women. This study uses a qualitative method with data collection through library research techniques and online sources (internet) to analyze the process of strengthening women in the political field. This study found that Bangladesh's successful process of

strengthening women's politics was motivated by the presence of two important actors, namely the Awami League and the Mahila Parishad Organization, which succeeded in increasing the role of women in parliamentary politics from 15 seats in 1973 to 50 seats in 2008. The policy has represented the expansion of the role of women and gender equality according to the theory of liberal feminism proposed by Tickner and Betty. These two influential actors have succeeded in positioning Bangladesh to position itself as the only Third World Country from the South Asian region that is included in the top 100 global gender gap issues from 165 countries. Making Bangladesh a model country for other Third World Countries in solving gender gap issues, especially in women's participation in politics.

Keywords: Bangladesh, Liberal Feminism, Gender, Third World Countries, Women's Politics.

PENDAHULUAN

Bangladesh merdeka dari jajahan Pakistan pada tahun 1971, memiliki nilai-nilai keagamaan Muslim yang kental. Masyarakat Bangladesh dikategorikan sebagai masyarakat 'klasik' dimana sistem tetap didominasi oleh kaum laki-laki (Nazneen, 2017). Secara tradisional peran perempuan Bangladesh terbatas hanya pada ranah privat, bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, dan merawat anggota keluarga besar. Begitu juga dengan pandangan dominan tentang peran perempuan dalam masyarakat Bangladesh yang menempatkan mereka sebagai ibu, istri dan menantu perempuan.

Adanya nilai keyakinan islam yang mengikat masyarakat Bangladesh hingga memunculkan stereotip "Kaum perempuan dilarang untuk setara dengan laki-laki "menjadi pemicu utama penghambat perkembangan perempuan untuk turut berpartisipasi maupun terlibat dalam pengambilan keputusan. Perempuan tidak memiliki kesempatan berkontribusi dalam pengambilan keputusan dikarenakan kondisi yang menyudutkan mereka. Disisi lain, partisipasi politik perempuan dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Dengan harapan dapat menciptakan instrumen hukum yang sensitif akan gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan (Susanti, 2014).

Johnson (1992, dikutip dalam Rowlands, 1997) juga berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan dalam bentuk kontrol yang lebih besar atas isu-isu dalam kehidupan sehari-hari diperlukan, tetapi yang lebih penting adalah kontrol mereka atas formasi politik. Pemberdayaan pada level individu dan politik saling memiliki keterkaitan sehingga perubahan pada satu level dapat mempengaruhi dan membawa perubahan pada level lainnya. Sebaliknya, dia menekankan pada keterlibatan perempuan dalam prosedur

politik dan mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan dan memberikan perubahan pada pembangunan.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penguatan peran politik yang berusaha diusung oleh banyak aktor Bangladesh melalui berbagai usaha untuk terus meningkatkan partisipasi perempuan. Disaat bersamaan pemikiran Barat hadir di Bangladesh membawa optimisme bagi para pejuang kesetaraan gender untuk menginjak diskriminasi. Pemikiran Barat yang dibawa melalui gelombang aksi feminisme membuka mata masyarakat Bangladesh terhadap pentingnya isu kesetaraan gender. Serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keikutsertaan mereka (perempuan) dalam ranah pengambilan keputusan publik, karena akan berdampak pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik.

Pada tahun 1984 Bangladesh mulai mengikuti Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai titik awal melawan patriarki guna memutuskan rantai diskriminasi (Khatun, 2014). Hal ini memberikan pengaruh luar biasa terhadap tingkat kesadaran masyarakat akan isu partisipasi politik, maupun isu kesetaraan gender lainnya. Pada 8 Maret 1988, untuk pertama kalinya Bangladesh memperingati hari Perempuan Internasional.

Menyuarakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, memperjuangkan hak-hak reproduksi, berjuang untuk pemberdayaan politik dan ekonomi, menolak subordinasi agama dan memastikan peran publik (Saadia A. Tasneem, 2020). Sejak adanya komitmen serta berbagai usaha untuk mengangkat isu kesetaraan gender pada ruang publik, kinerja perempuan Bangladesh secara substansial meningkat signifikan. Pada tahun 1983 partisipasi perempuan hanya berada di angka 8,4% dan pada tahun 2010 berhasil mencapai 34% (Khatun, 2014, p. 04).

Kondisi politik suatu negara juga mempengaruhi perjuangan kesetaraan gender Bangladesh. Perseteruan antara dua Rezim berpengaruh seperti Partai Nasional Bangladesh dan Liga Awami juga menjadi catatan sejarah penting dalam usaha peningkatan peran perempuan dalam bidang politik Bangladesh. Syeda Razia Faiz seorang politikus perempuan dari Partai Nasional Bangladesh berhasil menaikan jumlah proporsi kursi perempuan di parlemen.

Hal Terjadi pada tahun 1990-an, membuat perempuan Bangladesh semakin berpengaruh di arenapolitik. Proporsi kursi meningkat dua kali lipat, yang semula 15 menjadi

30 kursi. Sistem kuota telah memastikan keterwakilan perempuan di parlemen nasional dan pemerintah daerah. Representasi dari kebijakan ini adalah, pada pemilu tahun 1991 telah dimenangkan oleh dua perdana menteri perempuan yakni Sheikh Hasina dan Khaleda Zia dan Hasina (Mohiuddin, 2008).

Disisi lain Sheikh hasina dari liga Awami selain menjadi rezim paling berpengaruh saat ini juga menjadi aktor yang gencar memberikan cetusan nilai-nilai demokrasi berlandaskan hak-hak perempuan. Membawa namanya sebagai Daughter of Democracy and Herald of Change “putri demokrasi dan pembawa perubahan” karena banyak memberikan kontribusi serta perubahan terhadap gerakan demokrasi partisipasi melalui berbagai aktivitas pemberdayaan perempuan (www.albd.org, 2021).

Dinamika perjuangan kesetaraan gender yang begitu kompleks, berimplikasi terhadap munculnya dua kekuatan besar yang menjadi roda penggerak paling berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi dan mengangkat isu pemberdayaan perempuan di Bangladesh. Pertama, Liga Awami muncul sebagai rezim yang begitu aktif mencetuskan ide-ide pemberdayaan perempuan. Kedua, kehadiran Bangladesh Mahila Parishad juga menjadi organisasi pendukung yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu kesetaraan gender, memberikan pengaruh yang begitu besar atas cikal-bakal ratifikasi CEDAW Bangladesh pada tahun 1984.

Prestasi peningkatan peran perempuan ini membawa nama Bangladesh sebagai Negara Dunia Ketiga yang berhasil dalam menangani isu gender gap secara global. Dikutip dari world economic forum (WEF) pada tahun 2021 dari 165 negara, Bangladesh adalah satu-satunya Negara Dunia Ketiga yang berhasil masuk 100 besar menempati posisi ke 65 dalam keberhasilan penanganan isu gender gap. Menempatkan Bangladesh selama 7 kali berturut-turut sebagai peringkat pertama dalam isu gender gap di wilayah Asia Selatan, sejak tahun 2014 (www.dhaka.tribune.com, 2021). Adapun prestasi paling baik diangkat oleh Bangladesh adalah isu pemberdayaan politik perempuan (WEF, 2021).

Negara dengan status Negara Dunia Ketiga, seringkali abai akan isu penguatan politik perempuan. Namun Bangladesh telah berhasil mematahkan stereotip patriarki dengan melakukan penguatan dan perluasan peran perempuan di ranah politik. Menjadikan negaranya sebagai negara percontohan bagi Negara Dunia Ketiga lainnya dalam mengangkat isu gender, khususnya pemberdayaan politik perempuan. Melihat keberhasilan

inilah, penulis ingin mengetahui bagaimana proses penguatan peran politik perempuan di Bangladesh?. Dengan melakukan proses analisa kebijakan politik dalam menggaungkan penguatan peran perempuan. Serta aktor mana saja yang berpengaruh dalam keberhasilan penguatan politik perempuan di Bangladesh, dengan menggunakan kerangka pemikiran teori feminisme liberal.

METODE

Secara umum Feminisme dikenal dengan "perjuangan perempuan" yang hadir karena tekanan, diskriminasi hingga dominasi lak-laki yang membatasi hak-hak perempuan dalam berbagai ranah kehidupan. Dikembangkan di Eropa pada abad 16-18 tahun sebelum Masehi feminisme menjadi upaya dalam menghapuskan sistem patriarki (Diana Mutiara Bahari, 2019). Pada abad 19 Feminis liberal muncul sebagai suatu kritik dari ketidaksepakatan tentang bagaimana kebebasan harus dipahami.

Pemikiran mengenai feminisme terus berkembang hingga pada abad 20 Betty Friedan dalam buku *The Feminist Mystique* dan *The Second Stage* mengartikan bahwa Feminis Liberal menempatkangagasannya pada konsep liberal yang menekankan, bahwa wanita dan pria diciptakan sama, mempunyai kesempatan yang sama dan mempunyai hak yang sama. Peran wanita dapat disamakan dengan peran laki-laki termasuk dalam bidang privat, publik, struktur institusi dan kepemimpinan (asppuk.or.id, 2012). Pernyataan akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik juga ditekankan oleh Tickner seorang teoriwan hubungan internasional feminis, yang berpendapat bahwa "Feminisme liberal dapat memperluas peran perempuan secara lebih jauh untuk di inklusikan dalam kehidupan publik. Dimana inklusitersebut berfokus pada persamaan hak, serta mengedepankan kebebasan individu agar perempuan dapatmerasakan hak-hak laki-laki "(Tickner & Sjoberg, 2007).

Feminis Liberal menginginkan adanya kebebasan perempuan terhadap peranan gender yang opresif. Adanya androgini atau kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan dapat membantu mereka dalam meraih kebebasan, persamaan hak dan keadilan. Negara ikut bertanggung jawab dalam menjamin tidak ada lagi diskriminasi pada perempuan baik penghasilan, peran dalam berbagai ranah, serta menjaminkebebasan dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan.

Feminis Liberal sangat penting dalam pergerakan perjuangan bagi perempuan untuk

meraih persamaan hak, peniadaan diskriminasi hingga terciptanya perubahan hukum yang dapat menguntungkan perempuan. Dari penjelasan mengenai kehadiran dan arah feminisme liberal sesuai pandangan Betty yang membahas mengenai usaha kebebasan perempuan, penulis berusaha menjadikan teori ini sebagai landasan untuk menjelaskan penguatan peran perempuan dalam ranah politik di Bangladesh. Artikel ini ditulis melalui document based research dan Internet based research yang berdasar pada studi pustaka dari penelitian dan data kualitatif yang relevan. Untuk menganalisis permasalahan dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moelong (2005:6) Penelitian kualitatif merupakan penelitian guna memahami sebuah fenomena melalui analisis perilaku, tindakan, motivasi secara holistic yang bersifat deskriptif dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sejalan dengan definisi tersebut, penulis menekankan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan, ialah dengan mengolah dan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, laporan dan sumber media daring (internet) melalui rujukan situs resmi terkait seperti website organisasi, pemerintah maupun portal berita yang relevan. Dalam proses analisis isu ini penulis juga didukung dengan teknik analisa induktif. Dengan mengolah dan memahami data yang berhasil ditemukan, kemudian dikaitkan dengan kerangka pemikiran feminisme liberal. Adapun objek dalam tulisan ini, yakni negara Bangladesh dalam dinamika penguatan peran politik perempuan. Menyoroti dua aktor penggerak utama terciptanya gerakan perempuan, yaitu rezim Liga Awami dan organisasi Mahila Parishad.

PEMBAHASAN

Konstelasi Politik Bangladesh

Secara historis Negara Bangladesh dahulu merupakan bagian timur Pakistan, menjadi negara berdaulat pada tahun 1971. Negara baru yang dipimpin Syekh Mujibur Rahman akhirnya menjadi Negara Republik, bukan Negara Islam walaupun sempat mendapatkan perlawanan dari kelompok Islam garis keras. Adapun struktur demokrasi Bangladesh baru dimiliki pada tahun 1991, setelah masa diktator militer. Bangladesh memiliki sejarah panjang dalam konflik politik, perseteruan dua rezim kuat yakni Partai Nasional Bangladesh (PNB) dan Liga Awami menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik negara. Liga Awami merupakan rezim yang berideologi sosial demokrat, sementara Partai Nasionalis Bangladesh,

berhaluan nasionalis konservatif.

Kehadiran dua tokoh perempuan dalam politik Bangladesh seperti, Ketua PNB Khaleda Zia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Bangladesh, dan Sheikh Hasina ketua Liga Awami mantan Perdana menteri memiliki rivalitas sengit hingga saat ini (dw.com, 2007). Kemunculan dua sosok perempuan ini dalam kancah politik Bangladesh, membuat hubungan antara keadilan gender dengan posisi politik perempuan menjadi lebih implementatif.

Sebenarnya kedua rezim ini merupakan aktor penting dalam perwujudan agenda kesetaraan gender di Bangladesh, terlepas dari isu konflik yang melibatkan keduanya. Posisi tinggi yang diraih oleh dua perempuan hebat seperti Sheikh Hasina dari Liga Awami dan Khaleda Zia dari Partai Nasional Bangladesh (PNB) ikut mempengaruhi dinamika perjuangan pemberdayaan perempuan di Bangladesh. Berikut berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh kedua partai dalam agenda pemberdayaan perempuan.

Tabel 1. Gambaran Kebijakan Partai Nasional Bangladesh (PNB) dan Liga Awami dalam Mengangkat Isu Kesetaraan Gender dari Tahun 1970-2021

No	Tahun	Kebijakan	
		Liga Awami	Partai Nasional Bangladesh
	1970-an	Inisiasi berbagai gerakan reformasi untuk pembebasan hak-hak perempuan. Dengan memunculkan gerakan seperti Bangladesh Mahila Parishad dan organisasi hak-hak perempuan. 1972 pemerintah Bangoabondhu telah mengambil langkah pertama untuk memberdayakan perempuan melalui pemberdayaan administratif dan inklusi perempuan dalam pengambilan keputusan.	-
	1990-an	1997 merumuskan Kebijakan Pembangunan Perempuan Nasional dan meningkatkan pemesanan kursi politik perempuan	1990-an memperkenalkan RUU tentang hak-hak perempuan dan RUU keluarga Muslim
	2004	-	Perubahan RUU tentang kuota kursi politik dalam Pasal 2 dan 16.1(c) UU Bangladesh.
	2008	Merumuskan Kebijakan Pembangunan Perempuan Nasional 2011 dengan evaluasi kebijakan sebelumnya. Berhasil meningkatkan jumlah kuota kursi politik	-

		perempuan menjadi 50 kursi	
	2021	menegakkan hak-hak perempuan, pemberdayaan dan pengarusutamaan dalam pembangunan secara keseluruhan.	-

Source: Data ini diolah penulis dari berbagai sumber bacaan: Rahman (2016), (James, 1989), (Lawyer, 2018)

Tabel tersebut menjelaskan perbandingan usaha kedua rezim dalam mengangkat isu kesetaraan gender. Liga Awami menjadi rezim yang sangat berpengaruh terhadap isu pemberdayaan perempuan dan penguatan politik perempuan Bangladesh. Ideologi Partai yang Sosialis serta idealisme sebagai pemimpin kekuatan "pro-pembebasan" di Bangladesh menjadi komitmen awal dan Visi mereka sebagai aktor penting Bangladesh. Dengan landasan pemikiran itulah, gaungan akan misi mengangkat isu-isu kebebasan perempuan menjadi concern rezim ini (AL, 2009).

Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diusung oleh Liga Awami dalam menegakkan hak-hak perempuan. Pada tahun 2021, kebijakan yang diusung oleh Liga Awami dapat mempresentasikan adanya upaya membumikan teori feminisme liberal untuk dapat diaplikasikan secara utuh guna menegakkan hak hak perempuan.

Selain itu, jabatan salah satu tokoh dari Liga Awami, yakni Sheikh Hasina sebagai Kementerian Urusan dan Anak juga ikut mempengaruhi keaktifan rezim ini dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi serta aktifnya kegiatan pemberdayaan dan gerakan perempuan di Bangladesh. Pernyataan ini dibuktikan melalui fakta, bahwa selama kepemimpinan Sheikh Hasina dalam bidang politik Bangladesh, mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan di kursi politik.

Sebaliknya, minimnya kontribusi Partai Nasional Bangladesh jika dibandingkan dengan Liga Awami disebabkan oleh peralihan kekuasaan dari Partai Nasional Bangladesh menjadi Liga Awami. Peralihan kekuasaan ini menyebabkan kurangnya legitimasi yang diperoleh oleh Partai Nasional Bangladesh dalam pengambilan keputusan. Sebuah data menunjukkan Liga Awami berhasil menguasai parlementer pada tahun 2018 dengan total kursi 257 dari 300 kursi dan 21 % kursi diduduki oleh perempuan (www.ecs.gov.bd, 2018), sehingga kebijakan mengenai pemberdayaan politik perempuan serta berbagai gerakan perempuan lebih banyak diusung oleh Liga Awami sebagai rezim penguasa Bangladesh saat ini.

Dinamika Penguatan Partisipasi Perempuan Bangladesh

Bangladesh merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan, memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 167 juta jiwa pada tahun 2021. Terdapat sekitar 84,7 juta populasi laki-laki atau setara 50,6% dan 82,6 juta populasi perempuan atau setara 49,4% (countrymeters.info, 2021). Sempat memiliki masalah akan ketimpangan gender yang begitu besar ketika Bangladesh masih menjadi bagian dari Pakistan pada 1940-an. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tinjauan historis, perempuan Bangladesh mendapatkan banyak diskriminasi dalam melakukan aktivitasnya. Stereotip "Perempuan hanya diperkenankan melakukan aktivitas terbatas pada ranah privat seperti mengurus keluarga dan rumah" masih begitu lekat pada masyarakat kala itu. Stereotip ini membuat perempuan rentan akan tindakan diskriminatif, berdampak pada sedikitnya wanita yang bisa menduduki peran kepemimpinan (USAID, 2021). Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari 164 juta jiwa penduduk, hanya berkisar 50% Perempuan yang duduk di kursi politik dari total 82% populasi perempuan Bangladesh (Ahmed, 2018).

Alasan lain yang menjadi faktor rendahnya partisipasi perempuan dalam ranah politik di Bangladesh, dapat dikaitkan melalui pernyataan dari Democracy Watch (2003) yang menyatakan bahwa, "perempuan yang ingin terjun ke politik terhambat dikarenakan alasan pertentangan dari ideologi, keyakinan (agama), hingga tradisi masyarakat (kultur) yang menyebabkan hambatan dalam partisipasi". Adanya berbagai batasan terhadap hak partisipasi perempuan tersebut sebenarnya tidak tepat jika dikaitkan dengan ide feminisme liberal, hal ini dijelaskan oleh Betty Friedan (1963), "Dalam bermasyarakat seharusnya perempuan memiliki kesamaan hak dengan laki-laki tanpa diskriminasi maupun pengecualian". Namun seiring perkembangan zaman, negara ini membuat langkah-langkah perubahan untuk mengentaskan diskriminasi dan berusaha bertransformasi menjadi negara berkembang yang dapat meningkatkan peran perempuan (Thelwell, 2017). Berbagai gerakan feminisme terus bermunculan. Banchte Shekha, Women for Women, Adhunka, Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Naripokkho merupakan organisasi perempuan yang memiliki dedikasi menciptakan pembangunan perempuannasional Bangladesh. Berbagai organisasi ini hadir untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan, diskriminasi, patriarki melalui berbagai cara, diantaranya melobby pemerintah, melakukan advokasi hingga acara budaya (Jannah, 2018).

Adanya gerakan ini menunjukkan bahwa, Bangladesh telah berupaya untuk mereformasi budaya patriarki menjadi negara yang lebih ramah akan kesetaraan gender, melalui banyaknya gerakan perempuan yang dibuat guna menciptakan kesetaraan gender yang nyata. Usaha Bangladesh keluar dari jeratan diskriminatif atas tindakan patriarki dengan memunculkan gerakan dan kebijakan pemberdayaan perempuan membuahkan hasil. Pada tahun 2006 Bangladesh menempati posisi 95 dalam isu gender gap global, mengalami peningkatan menjadi peringkat ke 65 pada tahun 2021.

Berhasil mengangkat isu politik perempuan dengan menekan ketimpangan gender sebanyak 55% dalam isu politik perempuan. Berikut gambaran posisi Bangladesh dalam isu gender gap global pada tahun 2021 bersama dengan negara di wilayah Asia Selatan.

Tabel 2. Gambaran Posisi Negara Wilayah Asia Selatan dalam isu Gender Gap Global Tahun 2021

No	Nama Negara	Rank	Score 0-1
1	Bangladesh	65	0,719
2	Nepal	106	0,683
3	Bhutan	130	0,639
4	Sri Lanka	132	0,547
5	India	140	0,625
6	Pakistan	153	0,556

Source: <https://www3.weforum.org/>

Bangladesh menempati Bangladesh selama 7 kali berturut-turut menjadi satu – satunya negara dari wilayah Asia Selatan yang masuk 100 besar dalam isu gender gap global. Selain itu dalam atasi isu pemberdayaan politik, Bangladesh juga memiliki prestasi tertinggi dibandingkan dengan negara Asia Selatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel posisi Bangladesh dalam isu political empowerment dalam gender gap pada tahun 2021 dari 165 negara.

Tabel 3. Gambaran Posisi Negara Wilayah Asia Selatan dalam isu Political Empowerment dalam Gender Gap Global Tahun 2021

No	Rank	Nama Negara	Score 0-1
1	7	Bangladesh	0,546
2	51	India	0,276
3	61	Nepal	0,241
4	90	Sri Lanka	0,167
5	98	Pakistan	0,154
6	137	Bhutan	0,082

Source: <https://www3.weforum.org>

Dalam menentukan posisi sebuah negara berkaitan dengan penanganan isu gender gap global. World Economic Forum (WEF) melakukan perhitungan score dari 0-1 sebagai indikator perhitungan. Jika sebuah negara memiliki score mendekati atau mencapai 1 maka negara tersebut memiliki prestasi baik dalam menangani isu gender gap. Score Bangladesh yang hampir menyentuh angka 1 dalam isu pemberdayaan perempuan dalam politik dibandingkan negara lain (India, Nepal Sri Lanka, Pakistan dan Bhutan) menunjukkan keberhasilan Bangladesh dalam penanganan isu gender gap terutama dalam isu politik perempuan (IFES,2021).

Politik perempuan berkaitan erat dengan partai politik, dimana keberadaan perempuan di partai politik akan dapat mempengaruhi perilaku negara terhadap isu kesetaraan gender, tidak terkecuali isu politik perempuan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Mervis (2013:174) yang menyatakan bahwa "Partai politik merupakan gatekeeper demokrasi yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan sebagai anggota dan calon, sehingga ketika perempuan berkontribusi secara langsung maka perempuan akan dapat secara representatif ikut dalam usaha memastikan kesetaraan dalam memilih dan memastikan bahwa politik bebas dari kekerasan dan intimidasi".

Dengan demikian adanya keterbukaan peran maupun penguatan peran perempuan dalam bidang politik akan dapat memberikan dampak baik terhadap demokrasi negara serta keberhasilan dalam penyelesaian isu kesetaraan gender di Bangladesh. Keterlibatan perempuan Bangladesh mulai nampak ketika adanya legalitas konstitusional yang mengakui kehadiran perempuan dalam bidang politik pada tahun 1972. Peraturan tersebut berada pada artikel 28 (1) yang berbunyi "Negara tidak boleh mendiskriminasi setiap warga negara hanya karena berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, kasta, atau tempat lahir". Bunyi pasal tersebut kemudian didukung melalui pasal 28 (2) yang menegaskan bahwa "Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam semua bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat" (Bahari dkk, 2019). Adanya legalitas dan payung hukum ini secara tak langsung mengimplementasikan kinerja teori feminisme liberal menurut Tickner (2007) yang menekankan adanya kebebasan dan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik.

Peningkatan kesadaran akan politik perempuan di Bangladesh semakin meningkat sejak adanya komitmen mengikuti forum CEDAW pada tahun 1984. Selain itu terpilihnya

perempuan di kursi parlemen semakin memberikan pengaruh besar terhadap demokratisasi peran perempuan di dunia politik. Di bawah ini adalah tabel data representasi perkembangan perempuan di dunia perpolitikan Bangladesh.

Tabel 4. Gambaran Perempuan dalam Parlemen di Bangladesh (1973-2018)

Parlemen	Tahun Pemilihan	Kuota	Dipilih langsung	Jumlah representasi	Rata-rata representasi (%)
Parlemen 1	1973	15	0	15	4.80
Parlemen 2	1979	30	2	32	9.70
Parlemen 3	1986	30	5	35	10.06
Parlemen 4	1988	00	4	04	1.30
Parlemen 5	1991	30	4	34	10.30
Parlemen 6	1996	30	3	33	10
Parlemen 7	1996	30	8	38	11.5
Parlemen 8	2001	45	7	52	15.1
Parlemen 9	2008	50	20	70	20
Parlemen 10	2014	50	19	69	19.71
Parlemen 11	2018	50	23	72	21

Source: Election Commission Of Bangladesh dan <https://data.ipu.org/>

Sebelum tahun 1997 jumlah partisipasi perempuan di parlemen hanya sedikit. Hal ini dikarenakan, walaupun sudah ada legitimasi, namun kurangnya komitmen dari pemerintah dalam implementasi kebijakan membuat jumlah partisipan perempuan di kursi parlemen pada masa itu belum dapat terpenuhi (Ferdous, 2019). Titik awal peningkatan pesat ataupun penguatan partisipasi politik perempuan di Bangladesh terjadi pada tahun 1997, setelah adanya undang-undang yang memberikan kesempatan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam tingkat lokal pemilu (Zaman, 2016). Disisi lain amandemen konstitusi ini berakhir pada tahun 1987 yang mengakibatkan tidak ada kuota dalam pemilihan pada tahun 1988 (Paailinna, 2006).

Semua pemilihan umum di Bangladesh diadakan melalui pemungutan suara langsung atau dikenal dengan first-past-the post (FPTP). Namun, untuk mendorong keterwakilan politik perempuan, Bangladesh membuat kebijakan temporary special measures (TSM) atau melembagakan tindakan khusus sementara dengan melakukan pemesanan sejumlah kursi tertentu atau metode booking, untuk wanita di semua tingkat pemerintahan nasional dan lokal. Pada tahun 2004 badan legislatif Bangladesh yang dikenal dengan nama Jatiya Sangsad

berhasil melangsungkan amandemen ke 14 untuk menambah 15 pemesanan kursi untuk perempuan dalam bidang politik (Diana Mutiara Bahari F. D., 2019).

Peningkatan partisipasi perempuan di kursi parlemen semakin meningkat, terutama pada tahun 2008. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Kebijakan Pembangunan Perempuan Nasional pada amandemen ke-15 Bangladesh yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kuota perempuan di parlemen sebanyak 5 kursi. Sehingga kuota perempuan di parlemen pada tahun 2008 berjumlah 50 kursi dari total 350 kursi dibandingkan tahun 2001 yang hanya 45 kursi.

Semenjak adanya kebijakan Pembangunan Perempuan Nasional, partisipasi perempuan di kursi parlemen terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2018 total persentase keterwakilan perempuan di Parlemen menyentuh angka 21% dibandingkan tahun 2014 yang hanya 19.7% (Aljazeera, 2018). Sedangkan untuk melihat posisi perempuan dalam kursi parlemen dapat melihat tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Perempuan di Bidang Politik di Tingkat Pemerintahan

Posisi	Kursi Umum	Jumlah kuota Umum Perempuan	Jumlah Total kuota Umum	Persentase Perempuan(%)
Member Of Parliament(DPR)		23	300	7.67
Sub District Chair		5	492	1,02
City Corporation Mayor		1	12	8.33
Municipality Mayor		8	328	2.44
Municipality Councilor		4	2,972	0.13
Union Council Chair		29	4,571	0.63
Union Councilor		6	41,139	0.01

Source: <https://data.ipu.org/>

Dilihat dari data tersebut, dapat dilihat bahwasanya partisipasi politik perempuan sudah tersebar di berbagai lini pemerintahan di Bangladesh. Hal ini menunjukkan terdapat penguatan terhadap politik perempuan melalui partisipasi politik, terlepas dari fakta bahwa partisipasi laki-laki tetap tinggi dari Perempuan.

Kekuatan Perempuan Bangladesh

Pada 8 Maret 1988, untuk pertama kali Bangladesh memperingati Hari Perempuan Internasional. Mengusung tema-tema penghapusan kekerasan terhadap perempuan,

memperjuangkan hak-hak reproduksi, berjuang untuk pemberdayaan politik dan ekonomi, menolak subordinasi agama dan memastikan peran publik. Memperjuangkan hak-hak hukum, menantang wacana yang ada, meningkatkan perwakilan, mendorong perubahan kebijakan dan yang paling penting, menantang pola pikir dalam masyarakat patriarki yang represif (Khan D. H., 2021).

Feminisme Liberal menganggap bahwa gerakan feminis sangat penting dalam pergerakan pemberdayaan perempuan dalam meraih persamaan hak, peniadaan diskriminasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Bangladesh melahirkan dua aktor penting yang menjadi roda penggerak lahirnya berbagai kebijakan dan gerakan untuk mengangkat isu pemberdayaan. Terdapat dua kekuatan besar yang sangat berpengaruh dalam perlawanan dari kungkungan patriarki sepanjang sejarah perjuangan kesetaraangender Bangladesh.

Kedua kekuatan tersebut dibagi menjadi, kekuatan individu dan kelompok. Pertama, kekuatan individu dapat diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari individu atau tokoh yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ruang gerak perempuan. Sheikh Hasina merupakan contoh kekuatan individu yang nyata, selama masa jabatan pertamanya, Hasina melakukan hal besar dalam pembebasan Bangladesh pada tahun 1971, membuat perjanjian damai dan mengakhiri konflik selama beberapa dekade di CHT dan memberikan peran nyata terhadap proses demokratisasi Bangladesh pada tahun 1981. Selain itu Hasina juga membuka pintu gerbang kemajuan nasional melalui berbagai kebijakan yang turut membebaskan perempuan atas kungkungan patriarki.

Agar perempuan dapat memobilisasi dan memberdayakan perempuan, menurut Srilatha Batliwala, mereka harus melalui "proses menantang hubungan kekuasaan yang ada, dan mendapatkan kontrol yang lebih besar atas sumber-sumber kekuasaan." (Majumdar, 2012). Partisipasi penuh dalam kehidupan publik sangat penting untuk membangun dan mempertahankan demokrasi yang kuat dan dinamis untuk sebuah negara. Membantu memajukan kesetaraan gender dan mempengaruhi berbagai isu kebijakan maupun dapat berkontribusi dalam memberikan solusi untuk permasalahan negara.

Syekh Hasina melalui kebijakan Pembangunan Perempuan Nasional berusaha meningkatkan peran politik perempuan, dengan berpartisipasi di parlemen. Agenda ini tercapai, menjadikan perempuan sebagai perdana menteri dan pemimpin oposisi yang secara kolektif telah memerintah secara terus menerus selama lebih dari 29 tahun. Terdapat

menteri perempuan dalam kabinet yang menjadi pemimpin kementerian penting seperti pertahanan, luar negeri, energi, pertanian, dan dalam negeri Menurut Papera (2018) kehadiran perempuan yang menduduki kursi politik memberikan perubahan terhadap kondisi masyarakat. Sehingga pendapat dari papera dapat dilihat melalui dampak yang ditimbulkan dari keberadaan perempuan yang lebih tinggi di badan legislatif, menyebabkan meningkatnya perhatian terhadap kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan.

Berkat keberhasilannya dalam memberdayakan perempuan, Hasina Pada bulan September 2016 dianugerahi Planet 50-50 Champion oleh UN-Women dan Agent of Change Award oleh Global Partnership Forum atas kontribusinya yang luar biasa terhadap pemberdayaan perempuan (cri.org.bd, 2018).

Kedua, kekuatan kelompok diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari kelompok masyarakat maupun organisasi. Budi Setyono, menjelaskan bahwa keberadaan kelompok atau Lembaga Swadaya Masyarakat dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi (Cholisin, 1998). Dari banyaknya organisasi di Bangladesh, terdapat satu inisiator penting dalam memunculkan berbagai program pemberdayaan perempuan di Bangladesh, yakni Bangladesh Mahila Parishad (BMP). BMP adalah organisasi berbasis hak yang ada sejak tahun 1970 yang lahir untuk mencapai hak asasi perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender di Bangladesh. Bekerja untuk mempromosikan aktivisme, mempercepat gerakan sosial untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, mendorong partisipasi perempuan dalam proses politik, pengambilan keputusan serta mempromosikan gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan(www.girlsnotbrides.org, n.d.).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dan pembangunan perempuan. Bangladesh Mahila Parishad (BMP) berkomitmen untuk mempromosikan demokrasi yang, non-komunal, berbasis kesetaraan masyarakat dan negara yang manusiawi melalui kegiatan serta program yang disesuaikan dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan, pemberdayaan perempuan. Perjuangan BMP dalam menindas patriarki dimulai pada tahun 1997 dengan melobi pemerintah untuk ratifikasi penuh CEDAW. Hal ini dikarenakan pasal tersebut telah bertentangan dengan semangat Konvensi itu sendiri dan bertentangan dengan ketentuan Konstitusi Bangladesh (Naripokkho, 2003).

Melalui hasil lobi yang dilakukan oleh BMP, pemerintah Bangladesh pada akhirnya menyetujui untuk meratifikasi CEDAW dan Mahila Parishad dapat terlibat dalam

mempromosikan perspektif gender baik dalam kebijakan serta dalam implementasi pemerintah maupun non-pemerintah (Hoque, 2020). Bangladesh meratifikasi Konvensi pada 6 November 1984 dengan reservasi pada Pasal 2, 13 (a), 16.1 (c) dan (f) khususnya reservasi pada Pasal 2. BMP menjadi organisasi pemimpin kampanye terkait isu representasi perempuan di parlemen. Selain itu BMP juga aktif mempresentasikan diri sebagai aktor yang memperjuangkan perempuan, kesetaraan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam proses pembuatan keputusan (Marit Sørvald, 2005)

Semangat juang BMP terus berlangsung, berbagai kebijakan dan ide-ide untuk meningkatkan pembangunan perempuan terus dilakukan secara aktif. Sejalan dengan visi kelembagaan BMP untuk membangun demokrasi non-komunal, berbasis ekuitas masyarakat dan negara melalui emansipasi perempuan dengan membangun kesetaraan gender dalam keluarga, negara sekuler dan demokratis maupun masyarakat.

Pada tahun 2010-2014, BMP terlibat dalam reformasi pemberlakuan hukum di antaranya adalah undang-undang Pencegahan Pelecehan Seksual (Draft, 2010), Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengenai Pencegahan dan Perlindungan (2010 dan 2013), proteksi perdagangan manusia (2012), undang-undang pernikahan (2012 dan 2013), undang-undang pembatasan pernikahan anak (Draft, 2013), undang-undang diskriminasi pengecualian (Draft, 2014). Dari reformasi tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan yang direformasi oleh BMP adalah kebijakan terkait hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak perempuan (BMP, 2016).

BMP membuat proyek untuk mengurangi semua bentuk diskriminasi berbasis gender di Bangladesh dengan mewujudkan agenda pembangunan pasca 2015 dan menjaga kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan serta hak asasi perempuan di pusat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar hak asasi manusia, demokrasi dan pemerintahan yang baik. Selama periode tersebut, BMP telah memperluas kegiatannya di seluruh negeri dari Pusat hingga tingkat akar rumput. Pada tahun 2018 BMP merumuskan proyek berwawasan ke depan untuk lima tahun ke depan dari Juli 2018- Juni 2022 "Deepening the Initiatives for Promoting and Protecting Women's Human Rights in Bangladesh (January 2018 – December 2022).

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menegakkan hak asasi perempuan, supremasi hukum harus didirikan dan akses terhadap keadilan merupakan

prasyarat. BMP memberikan penekanan pada proses demokrasi dan lembaga yang mendukung supremasi hukum untuk menjamin hak asasi manusia (BMP, 2018). Pada level internasional, BMP menggunakan strategi diplomatis yakni membangun hubungan baik dengan gerakan hak asasi manusia perempuan lain, institusi atau lembaga tingkat regional hingga global seperti UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF (RIFATUL, 2018). Dari usaha ini, BMP berhasil mendapatkan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap implementasi strategi guna mencapai tujuan utama yaitu kesetaraan gender.

Dua kekuatan perempuan yang hadir dalam perjuangan emansipasi perempuan tersebut telah merepresentasikan, bahwa perempuan merupakan makhluk sosial yang dapat memberikan perubahan dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemberdayaan perempuan dengan terlibatnya perempuan dalam aspek politik secara tak langsung menunjukkan kekuatan perempuan yang menjadi tonggak terciptanya negara demokratis yang menghargai nilai-nilai hak kemanusiaan. Ketika lebih banyak perempuan bekerja, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan pembangunan yang positif (IMF, 2018). Sebaliknya, jika masih terdapat kesenjangan gender, maka akan dapat merugikan pembangunan negara baik itu sosial, politik hingga ekonomi (See Cuberes, 2016). struktur makro ini untuk memulai perubahan yang memberdayakan di tingkat individu.

Peran aktif perempuan dalam perjuangan nasional akan menimbulkan kesadaran di kalangan perempuan tentang hak-hak ekonomi dan politik mereka serta meningkatkan harapan kesetaraan gender dalam kehidupan publik dan pribadi (Jahan,1995:Azim,2016). Berbagai pernyataan tersebut menggambarkan bahwa, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor akan sangat mempengaruhi kemajuan nasional dan pribadi. Ketika perempuan dibiarkan mendapatkan hak-hak mereka untuk bekerja dan memimpin, maka kemajuan negara pun dapat dicapai. Perempuan merupakan bagian dari pembangunan sebuah negara, jika terdapat peran politik perempuan di suatu negara maka akan memberikan efek domino bagi masyarakat. Terbukti dengan meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, berhasil merubah Bangladesh dari negara terbelakang menjadi negara berkembang yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penguraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penguatan politik perempuan di Bangladesh dapat dianalisis melalui sejarah perkembangan dan aktor yang terlibat. Pertama, berdasarkan sejarah penguatan politik perempuan di Bangladesh dalam prosesnya cukup kompleks. Pada awalnya Bangladesh masih terkungkung erat dengan budaya patriarki yang didukung dengan ideologi islam yang menguatkan dominasi peran laki-laki dan menyempitkan peran perempuan pada tahun 1940-an sampai tahun 1970-an. Namun berjalannya waktu, para perempuan Bangladesh mulai sadar akan pentingnya peran mereka untuk mematahkan stereotip yang diskriminatif tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiran mereka sangat penting untuk terwujudnya negara yang demokratis dan maju akan pembangunan. Sehingga mulai bermunculan gerakan reformasi oleh rezim didukung dengan organisasi feminisme seperti, Banchte Shekha, Women for Women, Adhunika, Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Naripokkho untuk memutuskan rantai patriarki.

Kedua, munculnya dua aktor inisiator penting reformasi dan gerakan feminisme seperti Sheikh Hasina dan Organisasi Bangladesh Mahila Parishad, berhasil menghancurkan gelas-gelas kaca pembatas diskriminasi dari kaum patriarki. Sheikh Haisina menjadi tokoh penting dalam usungan berbagai kebijakan kesetaraan gender di Bangladesh. Berhasil meningkatkan peran perempuan di ranah politik yang hanya 15kursi di tahun 1973, menjadi 50 kursi di tahun 2008. Melibatkan perempuan tidak hanya di ranah atas (parlemen) tapi juga sampai di tingkat bawah yakni penasihat serikat (Union Councilor).

Adapun Bangladesh Mahila Parishad (BMP) juga menjadi organisasi partner pemerintah yang memiliki pengaruh besar dalam menguatkan peran politik perempuan di Bangladesh. Cetusan yang sangat berpengaruh besar akan posisi politik perempuan saat ini, ialah BMP berhasil mengadvokasi pemerintah untuk meratifikasi CEDAW pada 1997. Tidak hanya itu, BMP juga terus mengeluarkan upaya-upaya untuk terus mengangkat hak-hak perempuan hingga saat ini dengan terus mengadvokasi pemerintah dan membuat proyek berbasis pembangunan berkelanjutan bagi pemberdayaan perempuan.

Adanya gerakan reformasi dan feminisme serta berbagai kebijakan yang telah diusung oleh kedua aktor tersebut, secara tidak langsung merupakan bentuk implementasi dari teori Feminisme liberal. Dimana ide pemikiran yang sangat visioner akan pemberdayaan

perempuan telah diimplementasikan melalui kebijakan serta kehadiran organisasi Mahila Parishad sebagai penggerak gerakan feminisme di Bangladesh. Disisi lain Bangladesh telah berhasil meningkatkan peran politik perempuan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di kursi politik. Hal ini sesuai dengan teori Feminisme Liberal menurut Betty, yang menekankan bahwa wanita dan pria diciptakan sama, mempunyai hak yang sama dan juga harus mempunyai kesempatan yang sama, termasuk terlibat dalam kepemimpinan dan politik.

Karena keberhasilan Bangladesh meningkatkan kesadaran dan menguatkan peran perempuan inilah, yang menjadikan Bangladesh menempati posisi baik dalam mengangkat isu kesetaraan gender. Adanya keterlibatan perempuan dalam ranah politik, tidak hanya akan berpengaruh pada pengambilan keputusan, namun juga akan berpengaruh pada pembangunan nasional dan kepekaan maupun sikap negara dalam menangani isu kesetaraan gender.

Beberapa laporan global menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, Bangladesh telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemberdayaan politik. Menurut Laporan gender gap global 2021, Bangladesh menjadi satu-satunya negara dari wilayah Asia Selatan yang masuk dalam daftar 100 teratas Indeks isu gender gap global, dengan pencapaian skor 72,6% dari point maksimal 100%. Pada tahun 2018 Bangladesh berhasil meningkatkan jumlah proporsi kursi perempuan dalam bidang politik hingga mencapai 50 kursi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BMP, B. M. (2016). Completion Report January 2010 to March 2016, Quest for Gender Equality and Social Justice. Dhaka: Bangladesh Mahila Parishad (BMP).
- Democracywatch. (2003, Juli 03). Women Representation At The Jatiya Sangsad: An Opinion Survey. Dhaka: Democracywatch. Retrieved from Democracywatch.
- Hossain. (2017). The aid lab: explaining Bangladesh's unexpected success. In *he Aid Lab: Understanding Bangladesh's Unexpected Success*. USA: Oxford University Press.
- Khatun, F. (2014). Estimating Women's Contribution to the Economy. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).
- Marit Sørvald, N. C. (2005). Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005) Country Case Study: Bangladesh. 26.
- Mervis, Z. (2013). The Relationship Between Democracy and Women Participation in Politics. *Journal of Public Administration and Governance*, 174.
- Naripokkho. (2003). A Commentary on Bangladesh's Combined Third and Fourth Periodic Report for the Members of the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination

- Against Women. (International Women's Rights Action Watch, IWRA)
<http://hrlibrary.umn.edu/>
<http://hrlibrary.umn.edu/iwraw/shadow/bangladeshreport.htm>
- Nazneen, S. (2017). The Women's Movement in Bangladesh A Short History and Current Debates. In F.-S. (FES), *The Women's Movement in Bangladesh A Short History and Current Debates* (p. 2). Dhaka: FriedrichEbert-Stiftung (FES) .
- Paailinna, S. (2006). Women Reserved Seats in Bangladesh. In *Asystemic Analysis of Meaningful Representation* (p. 3). International Foundation for Electoral Systems (IFES).
- Soleha. (2017). *The Women's Movement in Bangladesh A Short History and Current Debates*. Banani Dhaka: Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bangladesch/13671.pdf>
- Sumaiya, R. J. (2013). Women and Land Rights in Bangladesh. In L. W. ANGOC, *Women and Land Rights in Bangladesh* (p. 14). <http://www.angoc.org/wp-content/uploads/2014/07/BD%20->
- Susanti. (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan SosialPolitik UMA*.P1-13.
- WEF, W. E. (2021). *Annual Report 2020-2021*. Switzerland: World Economic Forum. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_2020_21.pdf
- Zaman, F. (2016). Bangladeshi Women's Political Empowerment in Urban Local Governance. *South Asia Research*, 85-86.

Jurnal

- Cholisin. (1998). Dinamika LSM di Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Demokrasi. *Informasi*, Vo.26No.1, 1-8. [8.://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahukumdejure/article/view/1890/1526](http://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahukumdejure/article/view/1890/1526)
- Diana Mutiara Bahari, F. D. (2019). Women's Political Participation in Bangladesh in 2008-2018: Status Quo, Obstacles and Future Prospects. *Journal Islamic World and Politics*, Vol.03, No.2, 4. doi:<https://doi.org/10.18196/jiwp.3235>
- Ferdous, J. (2019). Representation Of Women In Parliament Of Bangladesh: It Is Hopeful? *Journal of Governance AndPublic Policy*.
- Jannah (2018). Upaya Bangladesh Mahila Parishad (BMP) dalam tuntutan kesetaraan gender di Bangladesh. Mohiuddin, Y. (2008). Sheikh Hasina & Khaleda Zia : Bangladesh Military is Desperate to Bring Down These Two Former Leaders-And It's Dragging the whole Country Down With Them. Sage Journal.
- See Cuberes, D. &. (2016). Aggregate Effects of Gender Gaps in the Labor Market: A Quantitative Estimate. *Journal of Human Capital*, 1-32. <https://www-journals-uchicago-edu>.
- Shetty, A. R. (2012). Empowering Women Is Smart Economics. *FINANCE & DEVELOPMENT*, Vol.49 No.01.

Internet

- Ahmed, Z. (2018, December 12). Why Bangladeshi politics is man's domain. Retrieved from

- www.dw.com: <https://www.dw.com/en/why-bangladeshi-politics-is-mans-domain/a-46696907>
- AL, C. o. (2009). THE CONSTITUTION OF THE BANGLADESH AWAMI LEAGUE. Retrieved from [web.archive.org: https://web.archive.org/web/20090315031859/http://www.albd.org/autoalbd/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=50](https://web.archive.org/web/20090315031859/http://www.albd.org/autoalbd/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=50)
- Aljazeera. (2018). BANGLADESH ELECTIONS 2018. Retrieved from [interactive.aljazeera.com: https://interactive.aljazeera.com/aje/2018/bangladesh-elections-2018/index.html](https://interactive.aljazeera.com/aje/2018/bangladesh-elections-2018/index.html)
- Armandhanu, D. (2015, January 23). Konflik Politik Bangladesh, 31 Orang Tewas. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150123142210-113-26862/konflik-politik-bangladesh-31-orang-tewas>
- asppuk.or.id. (2012), April 26). Liberal feminism. <http://asppuk.or.id/>: <http://asppuk.or.id/2012/04/26/feminisme-liberal/>
- countrymeters.info. (2021), 10 13). Bangladesh Population. [en/Bangladesh](https://countrymeters.info/en/Bangladesh)
- cri.org.bd. (2018, April 27). Sheikh Hasina Standing Up For The Women of Bangladesh. Retrieved from [cri.org.bd: https://cri.org.bd/2018/04/27/sheikh-hasina-standing-up-for-the-women-of-bangladesh/](https://cri.org.bd/2018/04/27/sheikh-hasina-standing-up-for-the-women-of-bangladesh/)
- dw.com. (2007, januari 12). Situasi Politik di Bangladesh Tidak Menentu. Retrieved from [www.dw.com: https://www.dw.com/id/situasi-politik-di-bangladesh-tidak-menentu/a-2956640](https://www.dw.com/id/situasi-politik-di-bangladesh-tidak-menentu/a-2956640)
- Hoque, M. (2020, April 04). Looking back at the 50 years of Bangladesh Mahila Parishad. Retrieved from [www.thedailystar.net: https://www.thedailystar.net/opinion/society/news/looking-back-the-50-years-bangladesh-mahila-parishad-1889242](https://www.thedailystar.net/opinion/society/news/looking-back-the-50-years-bangladesh-mahila-parishad-1889242)
- IFES. (2020). Women's Reserved Seat Systems in Bangladesh. Arlington: International Foundation for Electoral System (IFES). https://www.ifes.org/sites/default/files/womens_reserved_seat_systems_in_bangladesh_february_2020.pdf
- IFES. (2021). Women's Reserved Seat Systems in Bangladesh. Arlington: International Foundation for Electoral System (IFES). Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
- IMF, I. M. (2018). Pursuing Women's Economic Empowerment - [org.translate.goog/en/Publications/Policy-Papers/Issues](https://www.imf.org/external/eng/pubs/ft/ft-2018-001.pdf)
- Khan, D. H. (2021, March 08). Assessing women's economic leadership: How far have we come? . [how-far-have-we-come-212704](https://www.e-ir.info/2014/02/02/elections-in-bangladesh-political-conflict-and-the-problem-of-credibility/)
- Khan, M. (2019, Maret 08). Women's Day Special CEDAW at a dead end in Bangladesh. [https:// bangladesh-1711840](https://www.bangladesh-1711840)
- Khandaker, M. M. (2021). Gender Discrimination in Healthcare Spending in the Household and Women's Access to Resources: Perspective of Bangladesh. <http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp>: http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2013/documents/5140143_5b.pdf
- lorch, j. (2014, Februari 02). Elections in Bangladesh: Political Conflict and the Problem of Credibility. [www.e-ir.info: https://www.e-ir.info/2014/02/02/elections-in-bangladesh-political-conflict-and-the-problem-of-credibility/](https://www.e-ir.info/2014/02/02/elections-in-bangladesh-political-conflict-and-the-problem-of-credibility/)

- Majumdar, R. (2012, Juni 27). Are Bangladeshi Women Politicians Tokens in the Political Arena? [asiafoundation.org: https://asiafoundation.org/2012/06/27/are-bangladeshi-women-politicians-tokens-in-the-political-arena/](https://asiafoundation.org/2012/06/27/are-bangladeshi-women-politicians-tokens-in-the-political-arena/)
- Pepera, S. (2018, February 28). Why Women in Politics? Retrieved from [womendeliver.org: https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/](https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/)
- Saadia A. Tasneem, A. M. (2020, April 6). The Women's Movement in Bangladesh Throughout the Years. *The Daily Star*: https://www-thedailystar-net.translate.goog/in-focus/news/the-womens-movement-bangladesh-throughout-the-years-1889908?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui,sc
- Thelwell, K. (2017, Agustus 15). POVERTY IN BANGLADESH AND ECONOMIC GROWTH. https://borgenproject-org.translate.goog/tag/poverty-in-bangladesh/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui,sc
- USAID. (2021, 10 07). GENDER EQUALITY AND WOMEN'S EMPOWERMENT. https://www-usaid-gov.translate.goog/bangladesh/gender-equality-and-womens-empowerment?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui,sc
- www.albd.org. (2021, September 5). Sheikh Hasina: Daughter of Democracy and Herald of Change. <https://www.albd.org/articles/news/31112/Sheikh-Hasina-Daughter-of-Democracy-and-Herald-of-Change>.
- www.dhakatribune.com. (2021, April 04). WEF: Bangladesh top among south asian countries in gender equality for 7th time. [www.dhakatribune.com: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2021/04/04/wef-bangladesh-tops-south-asia-in-gender-equality-for-7th-time](https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2021/04/04/wef-bangladesh-tops-south-asia-in-gender-equality-for-7th-time)
- www.ecs.gov.bd. (2018). Election Results. <http://www.ecs.gov.bd/page/election-results?lang=en>
- www.girlsnotbrides.org. (n.d.). Bangladesh Mahila Parishad (BMP). Retrieved November 05, 2021, from [www.girlsnotbrides.org: https://www.girlsnotbrides.org/our-partnership/member-directory/bangladesh-mahila-parishad-bmp/](https://www.girlsnotbrides.org/our-partnership/member-directory/bangladesh-mahila-parishad-bmp/)
- www.infoplease.com. (2012). Awami League. <https://www.infoplease.com/encyclopedia/history/asia-africa/south-asia/awami-league>
- Zeidan, A. (2021, September 24). Sheikh Hasina Wazed prime minister of Bangladesh. [www.britannica.com: https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Sheikh-Hasina-Wazed](https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Sheikh-Hasina-Wazed)